

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini secara umum akan menyimpulkan beberapa argumen yang berupaya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Argumen tersebut disusun dengan penjelasan sebagai berikut :

Pertama, pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kehadiran BUMDes sebagai alat penggerak perekonomian ditingkat desa kemudian diharapkan mampu menjadi media pemberdayaan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya BUMDes, masyarakat bisa berpartisipasi dalam setiap unit usaha yang dijalankan BUMDes. Pentingnya keberadaan BUMDes sebagai media pemberdayaan masyarakat tentu menuntut BUMDes harus mampu berjalan dengan baik. Asumsinya BUMDes yang mampu beroperasi dengan baik tentu telah didukung oleh partisipasi masyarakat yang baik juga. Kondisi ini kemudian menunjukkan bagaimana proses pemberdayaan masyarakat berhasil berjalan dengan baik.

Kedua, pemberdayaan masyarakat yang berlangsung dalam keempat BUMDes yang diteliti secara umum berjalan baik. Meskipun jika dikaji lebih dalam dengan indikator sosialisasi, pelatihan dan partisipasi masyarakat terdapat perbedaan kualitas pemberdayaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Panggung Lestari dan BUMDes Giritama memiliki kualitas pemberdayaan masyarakat yang lebih baik dari BUMDes Amrih Makmur dan BUMDes Harum. BUMDes Panggung Lestari memiliki proses sosialisasi yang baik, proses pelatihan dan pengembangan yang baik dan didukung oleh partisipasi masyarakat yang baik juga. Kemudian BUMDes Giritama juga memiliki proses sosialisasi yang baik, proses pelatihan dan pengembangan yang baik dan partisipasi masyarakat yang baik. Sedangkan BUMDes Amrih Makmur proses sosialisasinya baik, proses pelatihan dan pengembangan kurang optimal dan partisipasi masyarakat kurang optimal. Begitu juga dengan BUMDes Harum proses sosialisasinya baik namun untuk proses pelatihan dan partisipasi masyarakatnya kurang optimal..

Ketiga, baik buruknya proses pemberdayaan masyarakat dari keempat BUMDes itu kemudian dipengaruhi oleh proses pengelolaan dari BUMDes itu sendiri. BUMDes yang mampu menjalankan roda organisasi dengan baik dan mengelola unit usaha dengan baik dan kreatif, maka proses pemberdayaan masyarakat akan berjalan baik. Sedangkan BUMDes yang proses pengelolaan lembaga dan unit usaha biasa saja bahkan sampai bermasalah akan berdampak pada proses pemberdayaan masyarakat yang kurang optimal.

B. Saran

Penelitian yang menggali aktivitas pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian ini sejatinya harus terus ditingkatkan. Terutama penelitian yang fokus pada objek BUMDes. BUMDes sebagai sarana yang pemberdayaan ekonomi desa

diharapkan harus dikelola dengan baik. Adanya peraturan perundang-undangan baru terkait desa telah membuka ruang bagi BUMDes agar bisa berkontribusi bagi desa. Oleh karena itu kajian-kajian terkait BUMDes harus selalu dikaji dan dievaluasi, terutama bagaimana inovasi-inovasi yang diterapkan dalam pengelolaannya.

Selanjutnya pada bagian akhir ini, sebagai bahan refleksi untuk penelitian ini, maka akan dipaparkan beberapa saran dan rekomendasi yang diharapkan berguna kedepannya.

Pertama, bagi Pemerintah sebagai institusi induk yang menaungi keberadaan BUMDes. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi pihak pemerintah terutama bagi Pemerintah Desa Panggunharjo, Canden, Dlingo dan Tirtoharjo. Evaluasi yang dimaksud adalah terkait dengan operasional BUMDes yang berdampak pada proses pemberdayaan masyarakat. Dimana Pemerintah Desa bisa mengevaluasi program dan proses pengelolaan lembaga yang baik dari setiap BUMDes. Hal ini penting dilakukan untuk kelangsungan BUMDes agar tetap bisa menjadi media pemberdayaan masyarakat.

Kedua, Harus ada system pertanggungjawaban yang efektif dan efisien untuk menghindari BUMDes yang gagal berjalan. Namun jauh dari itu, memang dibutuhkan menguatkan kompetensi sumber daya manusia, pengawasan, dan system pelaporan BUMDes yang berbasis partisipasi.